

**SUBALTERNITAS DAN REPRESENTASI GANDA
DALAM CERITA PENDEK “KALABAKA” KARYA IKSAKA BANU**

***SUBALTERNITY AND DOUBLE REPRESENTATION ON IKSAKA BANU’S
SHORT STORY “KALABAKA”***

Yuniardi Fadilah

Pascasarjana Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Sleman, 55281
Pos-el:fadilahdidit@gmail.com

(Makalah diterima tanggal 24 April 2020—Disetujui tanggal 30 November 2020)

Abstrak: Dalam cerpen “Kalabaka” yang berkisah tentang periode kolonial, permasalahan tentang penjajah dan yang terjajah selalu melibatkan pula permasalahan dikotomi Barat-Timur. Cerpen ini juga mempersoalkan tentang relasi kuasa, identitas, serta ruang. Terkait relasi kuasa antara penjajah dengan yang terjajah tersebut, kemudian, memunculkan peran antara yang dominan dan *subaltern*. Dalam hal ini, yang dominan tentu merupakan penjajah dan *subaltern* adalah pribumi yang terjajah. Persoalan seperti ini di dalam cerpen membuat penelitian ini menggunakan pandangan Gayatri Spivak tentang subalternitas dan representasi. Oleh karena itu, penelitian berusaha menjelaskan posisi *subaltern* yang dikonstruksikan oleh struktur cerpen serta peran representasi sebagai bentuk pelanggengan kolonialisme. Di dalam cerpen “Kalabaka”, subalternitas tercipta karena posisi dominan tokoh penjajah terhadap warga pribumi. Cara pandang Barat ini kemudian selalu memandang rendah Timur. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya representasi-representasi yang mencoba mengisi posisitokoh Kalabaka serta masyarakat Banda oleh tokoh Belanda di dalam cerita.

Katakunci: representasi, subaltern, pasca-kolonial, cerpen

Abstract: In the short story titled "Kalabaka" which revolves around the colonial period, the problem of the colonizers and the colonized always involves the problem of the East-West dichotomy. This short story also concerns about power relations, identity, and space. Related to the power relations between the colonizers and the colonized, then, the role of dominant and subalterns emerged. In this case, the dominant one is certainly the colonialist, and subaltern are the colonized indigenous people. These issues make this research choose to use Gayatri Spivak's view of subalternity and representation. Therefore, the research seeks to explain the subaltern position constructed by the structure of the short story and the role of representation as a form of the perpetuation of colonialism. In the short story "Kalabaka", subalternity is created because of the dominant position of the colonialist leader over the indigenous people. This Western perspective then always looks down on the East. This then led to the emergence of representations that tried to fill the position of Kalabaka figures and the Banda community by Dutch figures in the story.

Keywords: representation, subaltern, post-colonial, short story

PENDAHULUAN

Di masa setelah kemerdekaan, pembicaraan terkait karya sastra dengan tema kolonial di Indonesia cukup melekat kepada satu nama besar: Pramoedya Ananta Toer. Dengan tetralogi Buru-nya, nama Pramoedya seolah identik dengan karya sastra dengan tema kolonial meski beberapa karya yang lain tidak bertema demikian. Akan tetapi, Pramoedya telah tidak lagi berkarya. Hal ini kemudian mengangkat satu nama, yang sebenarnya tidaklah baru, yaitu Iksaka Banu.

Nama Iksaka Banu dalam dunia penulisan cerita dapat disebut tidaklah baru karena sedari kecil, dalam periode 1970-an, beberapa karyanya dimuat dalam beberapa majalah serta rubrik untuk anak-anak. Akan tetapi, dalam dunia sastra, Iksaka Banu kembali memulai kepenulisannya pada medio 2000-an. Hal ini lantas diganjar dengan terpilihnya dua judul cerpennya sebagai bagian dari 20 cerpen terbaik Indonesia versi salah satu institusi penghargaan karya sastra. Kemudian, salah satu buku kumpulan cerita pendeknya yang berjudul *Semua untuk Hindia* mendapatkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa di tahun 2014. Hal ini menjadi titik mula karir kepenulisan

Iksaka Banu. Mendapati bahwa cerita-ceritanya yang bertema kolonial mendapatkan tempat dan perhatian, Iksaka Banu mempertahankan hal itu pada beberapa karyanya kemudian. Salah satu kumpulan cerpennya yang bertemakan sejarah kolonial berjudul *Teh dan Pengkhianat* terbit di tahun 2019.

Sebagaimana banyak cerita dengan tema sejarah kolonial, kisah-kisahnya tidak lepas dari interaksi langsung ataupun tidak langsung antara penjajah atau penguasa kolonial dengan yang terjajah. Konotasi negatif kolonial timbul sesudah terjadi interaksi yang tidak seimbang antara penduduk pribumi yang dikuasai dengan penduduk pendatang sebagai penguasa (Ratna, 2011, hlm. 205). Hal-hal inilah yang kemudian menjadi bahan perbincangan kritik pascakolonial terhadap karya sastra. Foulcher dan Day (2006) kemudian merumuskan bahwa pascakolonialisme dalam pengkajian-pengkajian sastra adalah suatu strategi kritik yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mengidentifikasi jejak-jejak kolonialisme dalam teks-teks sastra maupun kritik, serta mengevaluasi sifat dan arti penting efek-efek tekstual dari jejak-jejak itu (hlm. 3). Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan

oleh Gandhi (1998, hlm. 4) seperti berikut.

“Pascakolonialisme dapat dilihat sebagai perlawanan teoretis terhadap timbulnya amnesia yang membingungkan akibat kolonial. Pascakolonialisme adalah proyek disiplin yang ditujukan sebagai tugas akademis untuk meninjau kembali, mengingat dan menginterogasi masa lalu kolonial. Proses kembali pada peristiwa kolonial mengungkapkan hubungan antagonisme yang timbal balik dan hasrat antara penjajah dan yang dijajah. Dan dalam hubungan yang bermasalah dan meresahkan inilah kita bisa mulai melihat bentuk pra-histori yang ambivalen dari kondisi pascakolonial.”

Akan tetapi, Said (1979), sebelum itu, membangun konsep dasar tentang pascakolonial yang lalu menggugat wacana Timur tersebut sebagai suatu produksi ilmu pengetahuan yang mempunyai landasan ideologis dan kepentingan-kepentingan kolonial. Dengan adanya dukungan dari tradisi, kekuasaan, lembaga, dan berbagai modus penyebaran pengetahuan, wacana

yang hadir kemudian menciptakan mitos dan stereotip tentang Timur yang dikontraskan dengan Barat oleh Barat itu sendiri. Konstruksi wacana tentang Timur tersebut memunculkan sifat pengkonstruksian terhadap identitas budayanya yang diciptakan dan dibangun oleh berbagai bentuk narasi, teks, dan dikuatkan oleh lembaga, tradisi, dan praktik (Said, 1979, hlm. 5–6). Dari pemikiran Said tersebut, simpulan yang muncul adalah adanya oposisi biner Barat-Timur dengan penjajah-terjajah sebagai pusat perhatiannya dan sifat dikotomi tersebut telah terkonstruksi demikian adanya.

Keberadaan mitos dan stereotip ini kemudian tidak hanya melekat pada pandangan Barat tentang Timur tetapi juga, dewasa ini, pada Timur tentang Barat. Hal ini terjadi sebagai bentuk trauma koloni yang terjajah terhadap mitos yang beredar terkait penjajahnya. Pembicaraan terkait bentuk-bentuk demikian coba ditulis oleh Iksaka Banu dalam cerpen-cerpennya. Sebagai sebuah periode yang seringkali ditolak menjadi bagian dari sejarah bangsa, Iksaka Banu mencoba menyadarkan pembacanya bahwa masa kolonial termasuk pada historiografi bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, Iksaka Banu tidak lantas

menawarkan cerita sejarah yang hitam-putih semata. Meskipun demikian tujuannya, tidak dapat dipungkiri, dikotomi Barat-Timur dan penjajah-terjahah adalah hal yang akan ada dalam cerita-cerita kolonial. Dengan demikian, relasi Barat dengan Timur atau penguasa kolonial dengan pribumi akan memunculkan permasalahan-permasalahan terkait kuasa, ruang, identitas, ataupun hierarki.

Salah satu cerpen Iksaka Banu yang berjudul *Kalabaka* turut mempermasalkan persoalan ruang, identitas, serta kuasa dalam masa kolonial di suatu peristiwa. Cerpen ini secara umum menampilkan kuasa dominan yang dimiliki oleh tokoh Belanda terhadap kehidupan tokoh pribumi sebagai individu atau kelompok. Selanjutnya, permasalahan identitas yang sedari awal, sebagaimana bentuk cerita tema kolonial, sudah terbangun tanpa adanya konstruksi tentang awalan atau proses hal tersebut terjadi di dalam cerita membentuk penggolongan antara yang dominan dan *subaltern*.

Sejalan dengan munculnya oposisi antara dominan dan *subaltern*, hal ini kemudian memunculkan representasi *subaltern* karena posisi *subaltern* yang dianggap tidak mampu untuk

mengidentifikasi diri. Hal ini disebutkan oleh Bertens (2008) bahwa dalam konteks produksi kolonial, *subaltern* tidak memiliki sejarah dan merupakan kelompok yang cenderung bungkam, subjek yang tidak dapat mengartikulasikan diri (hlm. 170). Oleh karena itu, kemudian, muncul representasi-representasi yang menganggap dirinya mewakili para suara yang bungkam tersebut. Dalam cerpen *Kalabaka* ini, representasi-representasi tersebut menghasilkan ambiguitas terkait posisi *subaltern* karena muncul asumsi-asumsi terkait *subaltern* yang saling kontradiktif antar representasi. Di luar itu, posisi penjajah sebagai yang dominan, dengan stereotip yang hadir saat ini serta representasi yang ada dalam cerpen, menjadi dipertanyakan keberpihakannya terkait apa yang dianggap benar oleh kolonial atau kepadaapa yang memang merupakan kebenaran menurut logika cerita dalam cerpen *Kalabaka*.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah sikap atau pandangan mendua pengarang sebagai bagian dari negeri yang pernah terjahah terhadap pihak penjajah, yang dalam hal ini adalah Belanda. Akan tetapi, permasalahan ini coba untuk tidak ikut dibahas dalam

penelitian ini karena fokus pembahasannya adalah teks cerpen dengan segala fenomena di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana posisi *subaltern* dikonstruksikan oleh struktur dalam cerpen. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menjabarkan representasi *subaltern* yang hadir di dalam cerita sebagai bentuk pelanggengan kolonialisme.

LANDASAN TEORI

Istilah *subaltern* yang digunakan oleh Spivak banyak dipengaruhi oleh pandangan, pemikir Marxis asal Italia, Antonio Gramsci. Dalam bukunya yang berjudul *Prison Notebook*, Antonio Gramsci memakai istilah ‘*subaltern*’ secara bergantian dengan ‘*subordinat*’ dan ‘*instrumental*’ untuk mendeskripsikan ‘kelompok atau kelas non-hegemonik’ (Morton, 2008, hlm. 156). Pemakaian istilah ini sedikit dijelaskan oleh Spivak bahwa penggunaannya tersebut untuk satu alasan, yaitu bahwa kata tersebut bersifat situasional. Penjabaran terkait hal ini Spivak (1990, hlm. 141) menuliskannya sebagai berikut.

“‘*Subaltern*’ awalnya adalah sebuah deskripsi tentang pangkat

tertentu dalam lingkup militer. Kata ini digunakan Gramsci karena adanya penyensoran: dia menyebutnya bentuk “monisme” Marxisme, dan terpaksa menyebut proletarian sebagai “*subaltern*”. Kata tersebut, digunakan di dalam paksaan, telah bertransformasi menjadi sebuah deskripsi tentang segala sesuatu yang tidak termasuk dalam analisis kelas yang ketat. Saya menyukainya, karena kata tersebut tidak memiliki kekakuan teoritis.”

Sebelumnya, istilah ini juga digunakan oleh Kelompok Kajian Subaltern. Dalam pendahuluannya, Guha (1982) menyebut bahwa istilah *subaltern* yang digunakan berdasar pada pengertian yang ada pada *Concise Oxford Dictionary*, yaitu, ‘dari tingkat yang lebih inferior’ (hlm. vii). Guha(1982) menambahkan bahwa istilah tersebut digunakan sebagai nama bagi atribut umum subordinasi dalam masyarakat Asia Selatan yang terekspresikan dalam istilah kelas, kasta, umur, gender dan kantor atau dengan cara yang lain. Lebih lanjut,istilah subordinasi tidak dapat dipahami kecuali sebagai suatu istilah konstitutif dalam hubungan biner di

mana yang lainnya adalah yang dominan, baginya ‘kelompok *subaltern* selalu tunduk kepada aktivitas kelompok yang berkuasa bahkan ketika mereka memberontak dan bangkit’(Guha, 1982, hlm. vii). Dalam hal ini, kelompok dominan yang dimaksud adalah para elit yang terbentuk oleh tradisi, baik itu elit-elit kolonial, elit nasional atau borjuis. Dengan demikian, dalam konteks kolonial, *subaltern* dapat dipandang sebagai label atau stereotip yang dilekatkan kepada individu atau kelompok pribumi pada umumnya di luar statusnya sebagai elit sebagai hasil pemikiran kolonial dan orientalisme tentang Barat dan Timur.

Pada penjelasannya yang lain, Guha(1982) menyebut bahwa istilah rakyat dan *subaltern*dapat menjadi sebuah sinonim (hlm. 8).Pada kajiannya, Kelompok Kajian *Subaltern* ini ingin menekankan bahwa konsep *subaltern* menandai perbedaan demografis antara kaum elit dengan yang lainnya di Asia Selatan. Walaupun Guha mengatakan demikian, rakyat dan *subaltern* dapat menjadi sinonim, Spivak pikir bahwa hal tersebut bukan poin substantif yang ingin disebutkan. Menurut Spivak, secara krusial ‘*subalternitas*’ merupakan posisi tanpa identitas (Morton, 2008, hlm. 159).

Sebagaimana diketahui, konteks penelitian Spivak lebih banyak menyinggung terkait hubungan eksploratif di dalam kehidupan sosial Dunia Ketiga dengan jejak-jejak kolonial bangsa penjajahnya. Selain itu, fokus pekerjaannya terkait pertanyaan-pertanyaan seputar pembagian kerja internasional dan terkenal karena formulasinya tentang *subaltern*. Tidak hanya itu, Spivak mengkaji *subalternitas* bukan hanya sebagai objek penelitian semata tetapi dengan tujuan agar posisi mereka sebagai *subaltern* dapat dihilangkan dengan munculnya kesadaran dari mereka dan tentunya dari elit penguasa. Hal ini seperti dituliskan oleh Landry dan Maclean (Spivak, 1996, hlm. 5--6) sebagai bagian pengantar buku *The Spivak Reader*.

“Seperti yang Spivak jelaskan dalam wawancara "Subaltern Talk", ketika dia mengklaim bahwa *subaltern* "tidak dapat berbicara", maksudnya bahwa *subaltern* seperti itu tidak dapat didengar oleh orang-orang dengan hak istimewa baik dari Dunia Pertama maupun Dunia Ketiga. Jika *subaltern* dapat membuat dirinya didengar — seperti yang terjadi ketika

subaltern tertentu muncul, dalam istilah Antonio Gramsci, sebagai intelektual organik dan juru bicara komunitas mereka — statusnya sebagai *subaltern* akan diubah sepenuhnya; dia tidak lagi menjadi *subaltern*. Dan itu adalah tujuan dari hubungan etis yang dicari dan diinginkan oleh Spivak — agar *subaltern*, konstituensi yang paling tertindas dan tak kasat mata, dimungkinkan untuk tidak ada lagi.”

Dengan penjabaran di atas, poin penting yang muncul terkait subalternitas, selain dikotomi penjajah dan yang terjajah, adalah posisi *subaltern* sebagai yang terbungkam dan pihak dominan yang berkuasa sebagai hasil konstruksi identitas yang melibatkan hubungan sosial antara yang dominan dengan yang terdominasi. Dalam sebuah diskusi mengenai kasus bunuh diri Bhubaneswari Bhaduri, perempuan yang pada akhirnya diketahui tergabung dalam golongan nasionalis bersenjata di daerah jajahan Bengali, contohnya, Spivak berpendapat bahwa kelompok *subaltern* perempuan tak mampu bersuara (Morton, 2008, hlm. 15). Dalam penjelasan keterkaitan bunuh diri

tersebut dengan “bersuara”, Spivak menilai bahwa sebenarnya “bersuara” yang dimaksudkan tidaklah selalu dalam artian literer tetapi *subaltern* memanglah tidak didengarkan suaranya secara harfiah.

Spivak (1999) mengatakan bahwa Bhubaneswari Bhaduri telah mencoba untuk “bersuara” dengan mengubah tubuhnya sebagai sebuah teks tentang perempuan/tulisan (hlm. 308). Seperti diketahui, Bhubaneswari Bhaduri melakukan bunuh diri dengan membakar tubuhnya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Spivak bahwa upaya bunuh diri tersebut tidak dianggap sebagai bentuk performatif oleh banyak pihak sehingga suara-suara *subaltern* yang menyuarakan dirinya dianggap tidak ada.

Dengan demikian, suara-suara *subaltern*, yang dianggap tidak ada tersebut, tidak dapat didengar atau dibaca. *Subaltern* sebagai yang terbungkam dianggap tidak memiliki kehadiran yang berdampak. Dalam konteks produksi kolonial, *subaltern* tidak memiliki sejarah dan tidak mampu bersuara (Spivak, 1999). Oleh karenanya, mengambil istilah Foucault, subjek-subjek *subaltern* ini adalah mereka yang mengalami normalisasi. Terkait hal ini, lantas Spivak menjelaskannya di dalam

esainya yang berjudul *Can The Subaltern Speak?*.

Untuk lebih menjelaskan tentang posisi *subaltern* sebagai yang terbungkam, Spivak menghubungkannya dengan permasalahan representasi. Spivak (1995) mengatakan bahwa bagi kelompok *subaltern* yang ‘asli’, yang identitasnya beragam, tidak ada subjek *subaltern* yang-tidak-terwakili yang dapat mengetahui dan bersuara untuk dirinya; solusi intelektualnya adalah untuk tidak bersikap abstain terhadap representasi (hlm. 80). Terdapat dua pengertian representasi yang hadir: representasi sebagai pembicara/perwakilan, seperti dalam politik, dan representasi sebagai re-presentasi atau pengejawantahan, seperti dalam seni atau filsafat (Spivak, 1995, hlm. 79).

Spivak menjelaskan maksud representasi dengan mengambil penjabaran Marx tentang *Vertretung* dan *Darstellung*. Kedua istilah ini digunakan Spivak di dalam esainya guna menjelaskan maksud posisi representasi yang dia maksud dengan kaitannya terkait negara dan individu. Dalam sebuah interview, Spivak (Spivak, 1990, hlm. 108--109) menjelaskan kedua istilah tersebut sebagai berikut,

“Pertama, tentang *vertretung*, melangkah pada tempat seseorang. *Vertretung*, untuk melangkah/menginjak (*tread*) pada sepatu seseorang, mewakili dengan cara demikian. Representasi dalam hal ini: representasi politis. *Darstellung—Dar*, ‘di sana’, tidak jauh berbeda. *Stellen*, ‘untuk menempatkan/menaruh’, sehingga menjadi ‘menempatkan di sana’. *Merepresentasikan*: ‘wakil’ atau ‘potret’... Sekarang, hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tindakan merepresentasikan secara politis, anda sebenarnya mewakili diri anda dan konstituensi anda dalam artian portret juga.”

Akan tetapi, representasi ini kemudian seolah menjadi perwakilan yang sangat mengerti dan memahami posisi *subaltern*. Oleh karenanya, representasi, yang banyak hadir melalui kaum intelektual, cenderung memanfaatkan posisinya tersebut untuk kepentingan-kepentingan politis. Dalam konteks kolonial, representasi dapat hadir melalui penjajah kolonial itu sendiri yang mencoba memetakan kaum *subaltern* melalui cara pandangnya. Hal ini dapat

terjadi karena kuasa kolonial atas posisi *subaltern*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, metode penelitian terbagi menjadi dua tahap: metode pengumpulan data dan metode analisis (Faruk, 2014, hlm. 25). Pada tahap pengumpulan data, penelitian ini mencari data dengan menyimak satuan-satuan linguistik yang dapat berupa frasa, kata, kalimat, dan paragraf signifikan di dalam objek material. Tentunya, satuan-satuan linguistik tersebut dipilih apabila memiliki keterkaitan dengan objek formal penelitian. Sebelum itu, objek material penelitian ini adalah cerita pendek karya Iksaka Banu yang berjudul “Kalabaka”. Di samping itu, objek formal dalam penelitian ini adalah perihal *subaltern* dan representasi dalam pandangan Gayatri Spivak.

Sebelumnya, data penelitian dibagi menjadi dua: data primer dan data sekunder. Data primer ini didapat di dalam objek material yang dapat berbentuk frasa, kata, kalimat, atau paragraf. Selain itu, bentuk dialog antar tokoh juga menjadi data primer jika dirasa memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Adapun data

sekunder penelitian ini didapatkan melalui sumber-sumber berupa buku, jurnal, artikel, dan beberapa sumber tulisan lain yang mampu menguatkan serta menambah kualitas analisis di dalam penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Ratna (2011) metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang menjadi pusat penelitian (hlm. 39). Dengan demikian, data yang didapatkan dari objek penelitian akan diuraikan berdasarkan penafsiran peneliti terhadap sumber data yang telah ada. Berikut adalah langkah-langkah proses penelitian.

- (1) Pembacaan objek material, cerpen “Kalabaka”, secara utuh.
- (2) Pengumpulan data-data yang sesuai dengan permasalahan penelitian: *subaltern* dan representasi.
- (3) Melakukan analisis, terhadap data-data yang terkumpul, berdasarkan dengan pandangan Gayatri Spivak terhadap *subaltern* dan representasi dalam ranah pascakolonial.
- (4) Menarik kesimpulan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kisah di dalam cerpen Kalabaka memperlihatkan bentuk interaksi antara tokoh kolonial Belanda dengan penduduk pribumi Banda. Di dalam cerpen, cerita berintikan tentang dendam kaum kolonial atas sebuah peristiwa di masa lalu yang ingin coba dibalaskan dengan menggunakan strategi-strategi kolonial yang licik. Berdasarkan cerpen, kelompok atau masyarakat yang berseteru dan terlibat dalam cerita adalah para kolonialis Belanda serta penduduk pribumi Banda dengan pengelompokkannya. Disebutkan di dalam cerpen, tokoh pribumi yang terlibat merupakan kelompok orang kaya Banda yang mengatur jalannya masyarakat Banda. Apabila mengikuti pengelompokan yang disebut oleh Guha sebagai '*the politics of people*' maka kelompok orang kaya Banda ini termasuk sebagai elit karena merupakan kelompok pribumi dominan dalam tingkatan lokal.

Akan tetapi, hal ini tidak berlaku di dalam cerpen karena adanya dikotomi Barat dan Timur. Para tokoh kolonialis Belanda ini, yang merupakan elit karena status Barat yang melekat pada diri mereka, tidak sepenuhnya menganggap kriteria kelompok orang kaya Banda ini

sebagai elit yang hak dan kedudukannya sama dengan mereka. Tokoh kolonialis ini lebih cenderung menganggap kelompok orang kaya Banda ini sebagai kelompok yang tingkatnya cenderung di bawah pejabat Belanda, yang mana tingkatan tersebut merupakan *subaltern*. Hal ini dipicu oleh adanya peristiwa masa lalu yang sebelumnya mengawali penceritaan cerpen.

Pada penjelasannya terhadap tokoh utama dalam cerpen, yang merupakan tokoh Belanda bernama Hendrik Cornelis Adam, Letnan Nicolas van Waert menjelaskan bahwa perjalanan ke Banda kali ini akan risikan dan kemungkinan akan dekat dengan banyak pertempuran. Hal ini dikarenakan pimpinan misi ini adalah Gubernur Jenderal Batavia, Jan Pieterszoon Coen, yang sebelumnya pernah pergi ke Banda untuk misi yang lain namun gagal. Ini disebutkan dalam cerpen sebagai berikut.

“Aku harus jujur padamu, Driek,” katanya. “Kemungkinan besar kita akan langsung menghadapi beberapa pertempuran brutal di Banda. Ada dendam Tuan Coen terkait kegagalan misi VOC terdahulu yang ingin ia lampiaskan.”

“Dendam?” tanyaku.

“Banda adalah kisah kelam bagi awak kapal VOC pimpinan Laksamana Willemesz Verhoeff tahun 1609.”...

(Banu, 2019, hlm. 5)

Tujuan misi sebelumnya adalah untuk membuka perdagangan antara VOC dengan penduduk Banda terkait komoditas pala. Namun, percobaan membuka perdagangan ini gagal karena penduduk Banda percaya tentang ramalan bahwa akan ada orang asing berkulit putih yang akan menaklukkan pulau itu. Oleh karena itu, penduduk Banda menolak kedatangan serta penawaran Belanda. Hal ini kemudian berujung dengan banyak pertempuran terjadi dan terjebaknya pasukan Belanda. Kegagalan misi ini seolah menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Belanda untuk misi selanjutnya. Sebagai Barat yang membentuk Timur, Belanda tidak menginginkan kisah seperti ini untuk lestari. Oleh karenanya, Belanda melakukan misi untuk membersihkan namanya dan tentunya penguasaan lahan pala yang sebelumnya gagal untuk dikuasai.

Permasalahan dendam ini kemudian membentuk citra *subaltern* terhadap pihak Banda seluruhnya. Belanda tidak mempersoalkan bahwa

kedudukan orang Banda tersebut sebagai kelompok dominan di wilayahnya. Di mata Belanda, penduduk Banda adalah *subaltern* yang seluruh haknya ditentukan oleh kolonialis yang datang untuk sebuah misi penguasaan terhadap Banda sekaligus upaya pembersihan nama. Tindakan penyerbuan yang dilakukan menunjukkan bahwa Belanda adalah yang dominan.

Setelah penyerbuan terjadi dan penaklukkan Banda dilakukan oleh Belanda, peristiwa kemudian beralih kepada negosiasi antara orang kaya Banda dengan Belanda untuk membicarakan tentang perdamaian. Di sini, peristiwa yang terjadi selanjutnya menunjukkan bahwa suara *subaltern* tidak didengar oleh elit yang-dominan. Dalam pengertian ini, suara yang dimaksud adalah bentuk pembelaan diri berupa argumen penduduk Banda yang diwakili oleh tokoh bernama Kalabaka. Adapun dialog antara Kalabaka dengan pihak Belanda sebagai berikut.

“Kami hanya membela diri. Sejak dulu orang Belanda yang mengawali pertumpahan darah!” ujarnya, saat Tuan De Houtman bertanya, mengapa mereka melawan kami. “Orang Belanda membeli pala kelewat murah,

tapi melarang kami berdagang dengan yang lain. Kini mereka merebut tanah kami.”

“Tapi dua belas tahun lalu, orang Tuan menjebak dan membantai kami. Padahal Belanda sudah ingin berunding,” kata Tuan De Houtman.

“Perundingan macam apa yang akan kami peroleh bila di sekeliling kami ada ratusan tentara bersenjata lengkap?” jawab Kalabaka.

(Banu, 2019, hlm. 9–10)

Posisi dominan Belanda, yang mencoba untuk tidak terlihat bersalah atas adu argumen yang terjadi, terlihat saat alasan untuk membantah tuduhan Kalabaka merupakan penghadiran peristiwa masa lalu yang relevansinya tidak ada. Alasan ini bersifat politis kemudian ketika digunakan untuk membenarkan proses penaklukkan Banda. Dengan kata lain, tanggapan Belanda bukanlah untuk menjelaskan alasan konkret kepada Kalabaka terkait penyerangan melainkan sebagai upaya mengelak. Selain itu, sikap melempar tuduhan oleh Belanda menunjukkan bahwa pendapat Kalabaka, yang posisinya sebagai *subaltern* kembali

ditegaskan oleh sikap penjajah kolonial terhadapnya, tidak perlu untuk diposisikan sebagai penting dan patut didengarkan.

Pada percakapan itu pula, posisi Kalabaka tampak kabur karena di satu sisi penggunaan simbol kata sapaan “Tuan” menunjukkan bentuk hormat dan kesetaraan yang dilakukan oleh tokoh Belanda terhadap Kalabaka. Akan tetapi, di sisi lain, tanggapan terhadap argumentasi Kalabaka oleh Belanda menunjukkan bahwa dirinya adalah *subaltern*. Pergeseran status Kalabaka sebagai, seharusnya, elit pribumi menjadi *subaltern* menjadi gambaran yang menunjukkan bahwa kuasa Barat sebagai yang dominan mampu mengkonstruksi Timur.

Tindakan Belanda tidak berhenti sampai peristiwa tersebut guna menyudutkan dan menegaskan posisi *subaltern* penduduk Banda. Peristiwa selanjutnya berkaitan dengan upaya membujuk masyarakat Banda untuk bekerja bagi perkebunan Belanda. Dengan tujuan ini, salah seorang orang kaya Banda ditugaskan untuk membujuk masyarakat, yang ada di desa, ditemani oleh lima kompi pasukan Belanda. Untuk menjamin hal ini berjalan lancar, Belanda menunjuk Kalabaka sebagai

sandera. Selanjutnya, seluruh pasukan yang ikut memutuskan untuk menginap. Salah satu pimpinan pasukan, yaitu Tuan Sonck, berkeras untuk tinggal di masjid agung meski mendapat penolakan. Peristiwa selanjutnya digambarkan sebagai berikut.

Bersama enam orang prajurit, aku ikut berjaga di sebuah rumah besar di depan masjid, sementara Letnan Van Waert dan beberapa perwira tidur di dalam.

Tengah malam, tiba-tiba terdengar beberapa kali letusan senjata, teriakan-teriakan, diiringi jilatan api besar dari dalam masjid. Aku menghambur ke tempat itu bersama puluhan tentara lain.

“Kita diserang!” Dari dalam masjid, orang-orang kami berteriak panik.

“Tapi di luar tak ada siapa pun,” kataku. “Dari mana api itu?”

“Lampu gantung! Ada penyelundup menjatuhkan benda itu sebagai isyarat menyerang!” jawab seorang prajurit.

Aku dan para petugas saling pandang. Sejak tadi kami

tak putus berkeliling. Bagaimana penyelundup bisa masuk masjid? Tepat pada saat itu, di muka balai desa terjadi kegaduhan lain. Dalam kegelapan malam, kami melihat banyak bayangan hitam bergerak ke segala arah.

“Itu mereka! Tembak!” Tuan Sonck memuntahkan isi senapannya, diikuti prajurit lain. Beberapa sosok tubuh bergelimpangan. Kuperiksa para korban dari dekat. Sepuluh mayat. Tapi tak ada hulubalang bersenjata. Kebanyakan wanita dan anak-anak.

(Banu, 2019, hlm. 11--12)

Pembunuhan yang dilakukan Belanda dengan dalih adanya perangkap yang dilakukan oleh penduduk Banda menunjukkan bahwa kehadiran penduduk Banda bukanlah nilai penting. Alasan awal untuk mempersuasi penduduk Banda agar mau menjadi pekerja perkebunan menjadi alasan yang lemah dengan demikian. Sikap Belanda yang tidak segan menembak penduduk Banda menjelaskan hal tersebut. Pemberian atas pembunuhan ini dilakukan Belanda dengan mengatakan bahwa ada tanda-tanda penyerangan oleh

penduduk Banda. Memori masa lalu mempengaruhi Belanda dan menjadikan hal tersebut sebagai trauma yang membuat mereka bersikap reaktif. Akan tetapi, kebenaran tentang penduduk Banda yang mulai menyerang dan membuat jebakan tidak dapat dipastikan. Namun, hal ini juga dapat diasumsikan sebagai upaya Belanda melakukan manipulasi untuk menyudutkan posisi penduduk Banda. Bentuk pembunuhan yang terjadi secara cepat oleh Belanda adalah sikap pandang penjajah terhadap *subaltern* karena tidak menunjukkan pertimbangan bahwa sebenarnya mereka akan menjadi Sumber Daya Manusia milik Belanda.

Hal ini kemudian menjadi alasan Belanda untuk mengeksklusi Kalabaka dari statusnya sebagai salah satu penguasa Banda menjadi tertuduh dan tentunya *subaltern*. Akan tetapi, peristiwa ini kemudian memunculkan representasi ganda yang mewakili *subaltern*. Representasi ini memandang penduduk Banda dari dua sudut pandang yang berbeda. Salah satu representasi merasa bahwa penduduk Banda tidak mungkin untuk menyerang pihak Belanda sedangkan yang lain mencurigai penduduk Banda sebagai licik.

Permasalahan representasi ini kemudian menguat terkait posisi Kalabaka yang akan menjalani hukuman. Selain itu, representasi ini juga kemudian mempermasalkan suara *subaltern* yang tidak diperhatikan. Untuk memperjelas konteks representasi dan *subalternitas* Kalabaka, peristiwa yang menjelaskannya sebagai berikut.

“Bagaimana dengan orang-orang kaya itu, Gubernur?” tanyaku.

Tuan Sonck tidak menjawab.

“Mereka ikut bersama kita sekarang, menghadap Tuan Coen di Naira. Ada pengadilan buat mereka,” bisik Letnan Van Waert.

...

Pukul delapan, para prajurit memaksa para orang kaya masuk ke dalam pagar itu, termasuk Kalabaka.

...

“Tuan,” kataku kepada Letnan Van Waert. “Ini kekeliruan besar. Mereka tak bersalah. Kalau kemarin tidak kita kejar ke atas bukit, tak mungkin mereka berani melawan.”

“Tapi keponakan Kalabaka dan beberapa orang lain sudah mengakui tergabung dalam sebuah komplotan yang ingin membunuh kita semua. Jatuhnya lampu di masjid itu memang sandi untuk menyerang,” sahut Letnan.

“Lihatlah tubuh mereka, Letnan. Mereka disiksa habis-habisan. Dengan siksaan macam itu, siapa pun akan mengakui semua tuduhan!” kataku sambil terus mengamati kandang bambu.

(Banu, 2019, hlm. 13--14)

Dengan melihat dialog di atas, kebenaran tentang upaya penduduk Banda menyerang Belanda menjadi terlihat bahwa hal tersebut memanglah rekayasa Belanda untuk menyerang balik. Kebenaran di mata Belanda didapatkan ketika suara *subaltern* tidak lagi didengarkan dan terpaksa dibungkam. Kebenaran itu didapatkan melalui pemaksaan kepada penduduk Banda untuk mengakui hal-hal yang tidak diketahui realitanya. Hak bersuara orang Banda diambil. Posisi mereka diwakilkan oleh pendapat-pendapat para Belanda yang tentunya tidak netral. Status penduduk Banda yang awalnya

adalah orang kaya kini berganti menjadi terpidana. Kuasa Belanda mengambil hak bersuara dan mengganti status *subaltern* menjadi bentuk dominasi tersendiri. Selama adegan ini, penduduk Banda yang akan menjalani hukuman hanya diam tidak menunjukkan gelagat untuk melawan atau bahkan untuk menyanggah tuduhan.

Tindakan diam Kalabaka perlu dipandang sebagai sebuah tindakan performatif. Memandang tindakan diam tersebut sebagai sebuah teks bahwa kebenaran yang tunggal menjadi misteri. Kekuasaan yang hadir dalam peristiwa tersebut memiliki pengaruh besar untuk mencegah kebenaran itu terungkap. Hal ini merujuk pada tindakan diam yang diambil oleh Kalabaka. Namun, tindakan diam ini, dapat dipandang sebagai pilihan yang memang diambil Kalabaka, atau paksaan yang diperintahkan oleh Belanda. Meskipun demikian, suara yang terbungkam ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak diketahui.

Namun, hal yang menjadi sorotan adalah representasi ganda yang berusaha mengambil posisi suara para *subaltern* ini. Representasi ini hadir tentunya tidak dengan persetujuan dari *subaltern*. Posisi mereka hanya mencoba mewakili suara *subaltern*. Akan tetapi, representasi

subaltern ini kemudian mendua. Sosok Letnan Van Waert, sebagai *vertretung*, menjadi representasi dengan kecenderungan politis Belanda. Hal ini selanjutnya cukup jelas karena sang Letnan dan pihak Belanda mempunyai rencana politis untuk menguasai wilayah Banda. Oleh karenanya, representasi ini sebenarnya adalah upaya untuk menyudutkan *subaltern*.

Di pihak lain, tokoh utama aku atau Hendriek Cornelis Adam, menjadikan sikapnya sebagai *darstellung*, yang menempatkan dirinya sebagai wakil suara *subaltern* yang terbungkam ini. Satu hal yang mendasarinya berbuat demikian adalah kebenaran yang dipercayainya. Sebagai sosok yang objektif dan netral meskipun merupakan seorang Belanda, tokoh utama ini mempertanyakan sikap tokoh Belanda lain yang juga menawarkan kebenaran mereka dengan asumsinya. Mewakili suara *subaltern*, representasi ini mempercayai bahwa pembungkaman *subaltern* adalah tindakan yang menyalahi kebenaran yang diinginkan. Tindakan penolakan oleh representasi ini menunjukkan adanya sikap politis yang bertujuan melanggengkan penguasaan Banda semata. Akan tetapi, kebenaran yang tunggal tidak secara eksplisit

dituliskan di dalam cerpen. Namun, sebuah adegan di dalam cerpen melemparkan hal ini kepada pembacanya sebagai berikut.

Kalabaka kembali menebar pandang. Saat beradu tatap dengan Gubernur Sonck, sorot matanya menjadi liar.

“Apakah Tuan tidak merasa berdosa?” mendadak ia berteriak nyaring dalam bahasa Belanda. Sayang sekali, sekejap kemudian kepalanya hilang. Tubuhnya ambruk ke tanah.

(Banu, 2019, hlm. 15)

Setelah perdebatan tentang misteri mana yang merupakan kebenaran dan tentu tentang konflik representasi ganda, permasalahan kemudian bergeser terkait status *subaltern* Kalabaka. Tindakan Kalabaka yang menebar pandangan tajam menjadi simbol perlawan seorang yang terbungkam. Akan tetapi, tindakan berikutnya adalah bentuk suara *subaltern* itu. Suara yang disuarakan tanpa melalui simbol-simbol seperti sebelumnya. Tetapi, ungkapan yang diujarkan oleh Kalabaka tidak menunjukkan sebuah hal yang utuh melainkan pertanyaan yang tentunya merujuk kepada kebenaran yang dicari.

Kebenaran tunggal yang membuat representasi para *subaltern* menjadi mendua.

Suara Kalabaka ini menjadi penting karena dengan ini posisinya sebagai *subaltern* lantas tumpang tindih. Ketika menyuarakan suaranya itu, identitas *subaltern* Kalabaka sudah menghilang karena dia menyuarakan suaranya sendiri tanpa terwakilkan. Akan tetapi, subalternitas ini ditentukan oleh kuasa dominan. Oleh karenanya, status itu, dalam pandangan Belanda, tidaklah berubah sehingga tindakan yang diambil kemudian adalah pembungkaman kebenaran oleh Belanda dengan membunuh sosok *subaltern* tersebut.

PENUTUP

Subalternitas dan representasi adalah pokok yang menjadi permasalahan dalam jalannya cerpen Kalabaka. Di samping itu, subalternitas dan representasi ini muncul karena adanya pertentangan terkait kebenaran dan apa yang dianggap benar oleh pihak dominan dan yang terdominasi. Dalam hal ini, permasalahan ini kemudian bersifat politis antara Barat dan Timur atau penjajah dengan yang terjajah. Mengikuti pandangan Barat, posisi Timur, dalam hal ini warga Banda, akan

selalu berada dalam label subaltern yang suaranya dan kehadirannya tidak dapat dan tidak perlu untuk didengarkan.

Lebih lanjut, kuasa dominan Belanda ditunjukkan dengan perampasan hak bersuara terhadap tokoh yang kemudian menghasilkan posisi *subaltern* yang dikonstruksikan. Hal ini kemudian memicu pergulatan tentang kebenaran yang memunculkan permasalahan representasi. Tokoh Belanda merasa mengetahui suara *subaltern* dan saling beradu untuk menunjukkan kebenaran yang dipegang. Peristiwa ini kemudian berlanjut, tentang penentuan kebenaran, dengan tumpang tindihnya statussubaltern terbungkam Kalabaka karena sempat menyuarakan suaranya namun kemudian dibunuh karena bersuara. Pergeseran identitas ini menjadi penegasan bahwa *subaltern* tidak mampu bersuara dihadapan dominasi elit kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

- Banu, I. (2019). *Teh dan Pengkhianat*. Jakarta: KPG.
- Bertens, H. (2008). *Literary Theory*. New York: Routledge.
- Faruk. (2014). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foulcher, K., & Day, T. (Eds.). (2006). *Clearing a Space: Kritik Pasca Kolonial tentang Sastra*

- Indonesia Modern.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gandhi, L. (1998). *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*. New York: Columbia University Press.
- Guha, R. (Ed.). (1982). *Subaltern Studies I. Writings on South Asian History and Society*. (Vol. 57, Issue 3). New Delhi: Oxford University Press. <https://doi.org/10.2307/2759093>
- Landry, D., & Maclean, G. (Eds.). (1996). *The Spivak reader: selected works of Gayatri Chakravorty Spivak*. New York: Routledge.
- Morton, S. (2008). *Gayatri Spivak: Etika, Subalternitas dan Kritik Penalaran Poskolonial*. Yogyakarta: Pararaton.
- Ratna, N. K. (2011). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*.
- Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, E. W. (1979). *Orientalism*. New York: Vintage Books.
- Spivak, G. C. (1990). The post-colonial critic: interviews, strategies, dialogues. Dalam S. Harasym (Ed.), *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*. New York: Routledge.
- Spivak, G. C. (1995). Can The Subaltern Speak? Dalam L. Chrisman & P. Williams (Eds.), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader* (pp. 66–111). New York: Columbia University Press.
- Spivak, G. C. (1999). *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of The Vanishing Present*. Massachusetts: Harvard University Press.